

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas utama jurnalis adalah menyajikan berita secara obyektif. Hal ini dikarenakan fungsi pers sebagai alat bagi masyarakat dalam memperoleh suatu informasi. Meriil dalam Siahaan (2001: 60) menjelaskan jurnalisme objektif adalah mustahil, dimana semua karya jurnalistik pada dasarnya subjektif. Nilai-nilai subjektif seorang wartawan terkadang ikut mempengaruhi semua proses kerja jurnalistik yakni mulai dari pencarian berita, peliputan, penulisan hingga penyuntingan berita. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Everette E Deniss dalam Siahaan (2001: 60) yang menyatakan bahwa jurnalisme objektif bukan sesuatu yang mustahil, karena pada dasarnya semua proses kerja jurnalistik dapat diukur dengan nilai-nilai objektif, misalnya saja memisahkan fakta dan opini, menghindari pandangan emosional dalam melihat peristiwa dan memberikan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta melihat suatu peristiwa dari kedua sisi.

Objektivitas dalam jurnalisme memang tak mungkin mencapai tingkat sempurna, Itu sebabnya, kompetensi dan profesionalitas wartawan harus terus ditingkatkan. Objektivitas secara bertahap dimengerti bukan hanya sebagai gaya penulisan berita impersonal yang berimbang melainkan juga mewakili tuntutan jurnalisme yang lebih luas bagi posisinya di dalam masyarakat, yakni sebagai pihak ketiga yang tidak memihak, serta sebagai pihak yang berbicara demi kepentingan umum. Berbicara mengenai pemberitaan yang berimbang serta berita yang bebas dari nilai-nilai subjektif seorang wartawan hal tersebut dapat diukur

menggunakan dimensi imparsialitas (*impartiality*) yang merupakan salah satu konsep dari objektivitas milik J. Westertahl (Siahaan, 2010 : 63).

Imparsialitas dipahami sebagai dimensi evaluatif pemberitaan yang dihubungkan dengan sikap netral wartawan terhadap objek pemberitaan, menyangkut kualitas penanganan aspek penilaian, opini, serta interpretasi subjektif (Siahaan, 2010: 64). Imparsialitas merupakan salah satu nilai sentral yang digunakan sebagai dasar dalam disiplin profesi yang dituntut oleh para jurnalis atau wartawan itu sendiri. Hal ini berarti sebagai alat penyampai informasi, pers berkewajiban untuk menyeleksi berita yang hendak disampaikan kepada publik, dan sebisa mungkin netralitas serta pemberitaan yang berimbang diterapkan dalam setiap pelaporan beritanya.

Pemberitaan yang netral dan berimbang dalam sebuah karya jurnalistik erat kaitannya dengan kredibilitas media itu sendiri serta kualitas informasi yang disampaikan. Kualitas suatu informasi menjadi pegangan penting dalam semua jenis karya jurnalistik. Salah satunya adalah karya jurnalistik dalam bentuk jurnalisme investigasi. Santana (2009:233), menjelaskan jurnalisme investigasi berbeda dengan jurnalisme regular yang lebih mengorientasikan pencarian pelaporannya pada informasi sehari-hari. Jurnalisme investigasi “mengejar” pertanyaan dibalik alegasi (pernyataan-pernyataan tanpa bukti) dan pendapat umum. Maka dari itu kinerja peliputan jurnalisme investigasi memberi kontribusi di dalam kehidupan demokrasi di sebuah negara. Pelaporannya memberikan pemberitahuan tentang berbagai pelanggaran politik dan berbagai skandal yang penting untuk diketahui masyarakat.

Salah satu pelanggaran politik yang dimaksud adalah terkait dengan kasus korupsi. Seperti yang dijelaskan Santana (2009: 235) dalam

bukunya *Jurnalisme Investigasi*, bahwa investigasi merupakan salah satu teknik peliputan jurnalisme yang terkait dengan permasalahan korupsi. Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti yang ingin melihat imparisialitas berita yang terdapat dalam kasus korupsi yang menyeret Komjen Budi Gunawan ketika Ia dicalonkan sebagai Kapolri, serta kaitannya dengan konflik KPK vs Polri.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri menuai banyak kontroversi di masyarakat. Hal ini dikarenakan pencalonannya sebagai kapolri dilakukan diluar prosedur “normal”. Presiden RI Joko Widodo mengangkat Budi Gunawan sebagai calon tunggal dengan menggunakan hak prerogratifnya sebagai presiden, tanpa melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Presiden Joko Widodo tak memungkiri bahwa penunjukan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri didasari faktor kedekatan. “Ya masak saya pilih yang jauh? ”Jokowi mengakui tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak Budi.“ Hak prerogatif saya pakai.Saya pilih, saya ajukan ke DPR,” ujarnya (tempo.co).

Setelah rencana pencalonannya sebagai calon tunggal kapolri yang diusulkan oleh Jokowi, Komjen Budi Gunawan justru ditetapkan KPK sebagai tersangka gratifikasi (kasus korupsi berupa menerima pemberian hadiah). KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Budi Gunawan diduga memiliki catatan merah/ transaksi janggal di rekeningnya serta

anaknya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK (nasional.kompas.com).

Penetapan Budi Gunawan sebagai kapolri serta terseretnya dia dalam kasus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) mengakibatkan perseteruan antara dua institusi penegak hukum yakni KPK dan Polri. Dimana sejak ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka pada awal bulan 2015 lalu, berbagai serangan ke lembaga KPK bermunculan. Misalnya saja muncul foto mesra Ketua KPK Abraham Samad dengan putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Selain itu kuasa hukum Budi Gunawan melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan agung. Dimana mereka menilai penetapan tersangka Budi tidak sah karena Hanya ditandatangani empat pimpinan, bukan lima pimpinan KPK, selain itu dilaporkannya pimpinan KPK ke Bareskrim Polri karena Pimpinan KPK dituding membocorkan rahasia negara yakni berupa hasil penelusuran PPATK terhadap rekeningnya dan keluarganya, serta mencemarkan nama baik (nasional.tempo.co).

Beberapa kontroversi yang terjadi dari pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, terseretnya ia dalam kasus gratifikasi hingga terkait dengan kisruh antara KPK vs Polri menjadikan majalah berita mingguan TEMPO tertarik untuk mengupas kontroversi kasus tersebut dalam sebuah pemberitaan dalam beberapa laporan utamanya yakni pada edisi 12 Januari-1 Maret 2015.

Gambar I. 1.

Majalah Tempo edisi 12 Januari-23 Februari 2015



(Sumber : majalah.tempo.co)

Majalah Tempo sendiri merupakan salah satu majalah berita mingguan yang menyediakan satu rubrik khusus Laporan Utama dengan gaya penulisan investigasi. Tempo secara kontinyu mencoba untuk memberikan sebuah informasi yang berbeda dibandingkan dengan media massa lainnya, dengan mengusung gaya pelaporan berita investigasi. Seperti yang dilansir dalam situs resmi Tempo yakni sebagai berikut :

Sejak terbit kembali 13 tahun lalu, majalah Tempo konsisten mengusung jurnalisme investigasi alias menyajikan kabar di balik berita dengan mengintip dan membongkar apa yang selama ini disembunyikan dari mata publik” (korporat.tempo.co).

Pemilihan majalah berita mingguan Tempo sebagai subjek penelitian sendiri dikarenakan intensitas pemberitaan terkait kasus Budi Gunawan, serta terkait kisruh dengan KPK Polri lebih tinggi dibanding dengan media lain salah satunya yang memiliki konsep yang sama yakni mengusung liputan berita mendalam adalah Majalah Gatra. Berdasarkan temuan peneliti intensitas pemberitaan Tempo terkait kasus Komjen Budi Gunawan serta kisruh dengan KPK vs Polri lebih tinggi dibandingkan dengan majalah Gatra. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel I. 1.
Intensitas Pemberitaan di Majalah Tempo dan Gatra

Edisi	Kasus/Isu	Jumlah Berita	
		TEMPO	GATRA
12-18 Januari 2015	Pencalonan Komjen Budi Gunawan	2	-
15-29 Januari 2015	Komjen Budi gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi	5	2
19-25 Januari 2015			
26-1 Februari 2015	Kisruh KPK vs Polri serta kaitannya dengan Komjen Budi Gunawan	6	-
2-8 Februari 2015		5	-
9- 15 Februari 2015		4	-
16-22 Februari 2015		6	-
23-1 Maret 2015		6	-
29 -4 Februari 2015		-	3
5-11 Februari 2015		-	3
12-18 Februari 2015		-	3
TOTAL BERITA		34 berita	11 berita

(Sumber : Olahan Peneliti)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas pemberitaan pada majalah berita mingguan Tempo lebih tinggi dibandingkan dengan Gatra. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah pemberitaan dalam kedua majalah tersebut. Tempo lebih *intens* dalam memberitakan kasus kontroversi Komjen Budi Gunawan. Dengan jumlah total berita Tempo pada edisi 12 Januari hingga 1 Maret sebanyak total 34 berita, sedangkan Gatra pada edisi 15 Januari hingga 18 Februari dengan jumlah total berita 11 berita.

Selain itu intensitas pemberitaan Tempo terkait pemberitaan tersebut dapat dilihat berdasarkan dijadikannya pemberitaan tersebut sebagai laporan utama dalam majalah Tempo dalam tujuh edisinya yang semua pemberitaannya dikupas menggunakan teknik jurnalisme investigasi. Berdasarkan pemaparan tersebut menekankan kembali bahwa pemberitaan terkait dengan Komjen Budi Gunawan serta kisruh KPK vs Polri menjadi penting untuk diketahui masyarakat. Hal ini juga kemudian menjadikan peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana imparisalitas (*impartiality*) dalam majalah Tempo. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penyampaian informasi yang netral dan berimbang bisa didukung dengan tidak dicampuradukannya opini dan fakta serta sebisa mungkin seorang wartawan hendaknya menerapkan pemberitaan yang tidak berat sebelah dan cenderung menghakimi kelompok tertentu atau pihak tertentu.

Berdasarkan pemahaman tersebut menjadi menarik ketika peneliti ingin melihat imparisalitas dalam majalah berita mingguan Tempo yang mengusung konsep Jurnalisme Investigasi. Santana (2009: 62) menjelaskan, pelaporan investigasi memiliki kandungan *judgment* yang lebih berat daripada pemberitaan regular. Berbagai keberhasilan investigasi skandal, salah satunya pada kasus korupsi kerap menggoda

para jurnalis untuk salah menyajikan fakta-fakta, menipu, berdusta serta memaksa masuk ke hal-hal privasi, serta yang paling ekstrim melanggar hukum serta berbagai tindakan cacat lainnya (Santana, 2009: 74).

Selain itu pelaporan investigatif juga memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaporan fakta-fakta tanpa bukti atau pelanggaran faktual. Hal ini mengundang banyak permasalahan di dalam soal label, fitnah, atau pencemaran nama Santana (2009: 226). Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut imparialitas pemberitaan menjadi penting untuk diukur, khususnya dalam majalah Tempo yang mengusung konsep Jurnalisme Investigasi. Dimana sebagai media yang fungsinya memberikan informasi kepada masyarakat luas, Tempo berkewajiban untuk memisahkan nilai subjektifnya yakni memisahkan antara opini dan fakta, serta menerapkan pemberitaan yang berimbang dan tidak memihak kelompok atau pihak tertentu

Terkait dengan imparialitas pemberitaan serta kaitannya dengan karya jurnalistik investigasi, berikut berbagai contoh kasus yang sempat menyeret Tempo yakni terkait dengan pencemaran nama. Kasus yang pertama yakni terdapat dalam laporan utama edisi minggu keempat pada tahun 2008, Tempo memberitakan kejanggalan kebijakan pemerintah dengan kisruh saham keluarga Bakri dalam artikel berita yang berjudul “Siapa Peduli Bakrie”. Tempo menganggap bahwa kebijakan pemerintah membekukan penjualan saham grup Bakrie erat hubungannya dengan balas jasa kalangan Istana Negara atas dukungan Bakrie dalam kemenangan pemilu 2004. Akibat dari berita utama tersebut Tempo digugat dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Selain itu kasus yang lainnya yang cukup menyedot perhatian publik adalah kasus Tomy Winata yang menggugat Tempo karena merasa

pemberitaan terkait dirinya dengan judul berita laporan utama “Ada Tomy di Tanah Abang” cenderung tendensius, diskriminatif, serta mengatur stigma terhadap orang lain. Adanya sumber anonim serta alinea-alinea pembuka dalam pelaporan Tempo yang tidak didukung data-data penunjang yang cukup, juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sengketa antara Tempo dan Tomy Winata (Harsono, 2010: 162). Berita yang mengungkap keterlibatan Tomy Winata dalam kasus kebakaran pasar Tanah Abang tersebut memang cukup menarik perhatian publik, karena juga diwarnai dengan penyerbuan kantor Tempo oleh pendukung Tomy Winata.

Selain itu pertengahan Januari lalu Tempo juga sempat dilaporkan terkait dengan laporan utamanya "Bukan Sembarang Rekening Gendut" edisi 19-25 Januari 2015. Tempo dilaporkan kepada Dewan Pers oleh kelompok yang menamakan diri mereka, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pada 22 Januari 2015 lalu. Pelaporan ini dilakukan terkait laporan Tempo yang mengungkapkan aliran dana Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada beberapa pihak, yang dituding melanggar UU Perbankan dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Gambar I. 2.

Majalah Tempo edisi 19 Januari

Tempo dipolisikan terkait pemberitaan rekening Budi Gunawan

Ging Ginjar
Wartawan BBC Indonesia

© 4 Maret 2015

← Kiri



(Sumber : bbc.co.uk)

Berdasarkan pemaparan kasus yang sempat menyeret majalah Tempo terkait dengan beberapa pelanggaran yang dilakukannya, menyangsikan kembali kredibilitas Tempo sebagai media dalam pelaporan beritanya. Kovach dan Tom Rosentiel dua pemikir jurnalisme terkemuka dari amerika serikat mengatakan bahwa elemen Jurnalisme yang utama adalah menyajikan kebenaran, liputan berimbang adalah salah satu cara menyajikan kebenaran (Harsono, 2010: 164). Hal ini berarti kredibilitas suatu media ditentukan oleh bagaimana suatu media menyajikan berita yang berimbang, tidak berat sebelah, serta netral.

Pemberitaan yang berimbang dan netral erat kaitannya dengan bagaimana suatu media menyajikan suatu pemberitan yang tidak memihak (imparsial). Pemberitaan yang imparsial mensyaratkan adanya peliputan berita yang tidak memihak salah satu pihak, yakni diterapkannya pemberitaan yang *cover both side* bahkan *all side* (meliput dari banyak segi dan sisi). Selain itu sebisamungkin pemberitaan harus bebas dari

interpretasi dan opini seorang wartawan, yang artinya suatu fakta seyogyanya apa adanya, tanpa adanya interpretasi wartawan yang masuk kedalam sebuah berita (Nurudin, 2009: 90).

Sejalan dengan Kovach dan Tom Rosentiel yang mengatakan bahwa elemen Jurnalisme yang utama adalah menyajikan kebenaran. Goenawan Mohamad dalam Steele (2007: 14) mengatakan bahwa tugas wartawan Tempo adalah mencari kebenaran, dimana mencari suatu kebenaran merupakan kewajiban kita sebagai seorang wartawan. Menurutny dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, kemarahan bisa muncul karena tidak lengkapnya informasi, opini, debat dan data. Sehingga tidak boleh untuk menyajikan pemberitaan yang hanya satu sisi saja, melainkan harus dari berbagai segi dan juga sisi.

Oleh karena itu menjadi penting ketika peneliti ingin melihat sejauh mana majalah Tempo menjaga imparisialitas pemberitaannya. Dalam mengukur dan menganalisanya, dalam hal ini penulis menggunakan analisis isi kuantitatif untuk melihat unsur *impartiality* yang terdapat dalam pemberitaan Kontroversi Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terkait dengan konflik KPK vs Polri dalam majalah Tempo.

Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks) (Eriyanto, 2011: 10). Metode analisis isi lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak dan bisa dikuantitatifkan ke dalam angka (Kriyantono, 2006: 60). Penelitian analisis isi dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Analisis isi juga didasarkan pada penelitian yang objektif, dan menghilangkan bias atau kecenderungan subjektivitas dari peneliti (Eriyanto, 2011: 16).

Metode ini digunakan karena peneliti ingin melihat imparzialità berita di majalah berita mingguan Tempo dan hal tersebut dapat diukur dengan menghitung indikator-indikator dalam pemberitaan melalui metode analisis isi. Indikator yang digunakan untuk mengukur imparzialità sendiri ada dua, yakni *balance* (keseimbangan) dan *neutrality* (netralitas). *Balance* ditentukan oleh dua kategori yakni *equal and propotional access* serta *even handed evaluation*. Selain itu kategori yang kedua untuk mengukur imparzialità adalah *neutrality* yang juga terdiri dari dua kategori yakni *non evaluative* dan *non ssensational*.

Menyadari pentingnya unsur Imparzialità diterapkan oleh media khususnya majalah Tempo yang mengusung konsep jurnalisme investigasi, serta tujuan analisis isi, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Imparzialità Pemberitaan Kontroversi Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terkait dengan Konflik KPK vs Polri di majalah Tempo edisi 12 Januari sampai dengan 1 Maret 2015.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Imparsialitas Liputan Berita Investigasi Pemberitaan Kontroversi Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terkait dengan Konflik KPK vs Polri di Majalah Tempo?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Imparsialitas Liputan Berita Investigasi Pemberitaan Kontroversi Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terkait dengan Konflik KPK vs Polri di Majalah Tempo.

I.4 Batasan Penelitian

1. Objek dari Penelitian ini adalah imparsialitas.
2. Subjek dari penelitian adalah berita investigasi terkait kontroversi pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terkait dengan konflik KPK vs Polri di majalah berita mingguan Tempo.
3. Metode Penelitian yang digunakan adalah Analisis Isi Kuantitatif.
4. Topik berita yang akan diteliti adalah kontroversi pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terkait dengan konflik yang terjadi antara KPK vs Polri.
5. Periode dalam penelitian ini adalah 12 Januari - 1 Maret 2015. Pemilihan periode ini dikarenakan Kontroversi Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terkait dengan konflik yang terjadi antara KPK vs Polri dibahas di majalah Tempo dengan gaya penulisan investigasi pada periode tersebut.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Teoritis

1. Mengetahui konsep imparsialitas pemberitaan dan hubungannya dengan penulisan berita.
2. Memperoleh pengetahuan tentang metode penelitian analisis isi dengan menggunakan konsep imparsialitas pemberitaan.

I.5.2 Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik dengan penelitian analisis teks media khususnya yang menggunakan metode analisis isi kuantitatif.
2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait pentingnya prinsip imparsialitas pemberitaan dalam media massa.
3. Dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi jurnalis serta institusi media massa majalah berita mingguan Tempo dalam melaporkan peristiwa kepada khalayak.

